

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Hasil Penelitian/Tugas Akhir, Artikel/Jurnal.

Adji, Indriyanto Seno. 2009, *Korupsi dan Penegakkan Hukum*, cetakan ketiga,
Diadit Media, Jakarta.

Al rasid, Harun. 1979. *Pengertian Keuangan Negara (Dalam Hubungannya
dengan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan)*, Majalah Keuangan No. 93.

Alatas, Syed Hussein. *Corruption: Its Nature, Causes dan Consequences*,
Aldershots, Brookfield, Vt: Avebury.

Algra, N.E. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoorden boe*, Tweede Druk, J.B
Wolters' Uitgeversmaatschappij, Groningen

Ali, Mahrus. 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan Kelima, Sinar
Grafika, Jakarta.

Amirudin. 2004, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 1994, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Atmadja, Arifin Soeria, 2017. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum
Teori, Praktik dan Kritik*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers. Jakarta.

Black, Henry Campbell. 2004, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*,
ST.Paul MN: West Group.

Branson, Douglas M. 2002, "*The Rule at Isn't A Rule - E Business Judgment
Rule*", *Alparaiso University Law Review*, Vol. 36, No. 34, Summer
2002.

Kenotariatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung,.

Boen, Hendra Setiawan. 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta.

Bothlink, F.R. *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing Op Ambtsragers In Nederland en en in Indonesia*, Dissertatie, de Rechtshgeleerheid aan de Rijksuniveristeit, Leiden.

Chazawi, Adami. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta.

Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Christiawan, Rio. 2020, *Uji Tuntas Hukum Legal Due Dilligence*, Sinar Grafika, Jakarta.

Clark, Robert Charles. 1986, *Corporate Law*, Aspen Publisher.

Effendy, Marwan. 2011, “*Pertanggungjawaban Kebijakan Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi*”, Bahan Kuliah Umum yang disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Jambi, Mendalo, Jambi.

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.

Frank Verbruggen dan Raf Verstraeten. *Strafrecht & Strafprocesrecht voor Bachelors*, Antwerpen: MakluUitgevers nv, hlm 6-7, 2009, Dalam penulisan Kevin D.Zega. 2020, *Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi Dengan Administrasi Negara*, Mappi, Depok

Hamzah, Andi. 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Hamzah, Andi. 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Harahap. M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Gary La Free dan Nancy Morris. 2004, *Corruption as a Global Social Problem*, George Ritzer (editor), *Handbook Of Social Problems: A Comparative International Perspective* (Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2004).
- Gold, Andrew S. 2007. *A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty*, (USA:Maryland Law Review Volume 66 Issue 2 Article 5, 2007).
- Ibrahim, Johnny. 2011, *Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No.2, Mei 2011, Jakarta.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 2021, *Laporan Kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Tahun 2020*, Jakarta.
- Jemarut, Wilhemus. 2013, *Penerapan Doktrin Duty Of Care dan Businesss Judgment Rule dalam Putusan No.428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Juliani, Henny, *Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*, (Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 4. Oktober 2016).
- Khairandy Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta.

Injustice, Jakarta.

Kansil. 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kennedy, John E. 1958, *Corporation: Powers-Ultra Vires-Problems Remaining After Legislative and Judicial Modifications Of Doctrine*, (Netherland: Notre Dame Law Review Volume 34 Issue 1 Article 7)

Kholiq, M. Abdul. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Kristiana, Yudhi. 2017, *Tehnik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Jakarta.

Latif, Abdul. 2016, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenana Media Group, Jakarta.

Lestari, Sartika Nanda. 2015, *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Notarius Edisi 08 Nomor 2 Semarang.

Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Y. 2021, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta.

Matondang, Erwin Matondang. 2011, *Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Misahardi, Wilamarta. 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Mochtar, Zainal Arifin. 2018, *Korupsi dan UNCAC serta Sistem Hukum
Administrasi Negara*, Genta Publisihing, Yogyakarta.

Muhammad, Abdul Kadir Muhammad. 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*,
Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum
Keuangan Negara Teori dan Praktik, Edisi Ketiga*, Rajawali Pers,
Jakarta.

Mulyana, Asep N. 2018, *Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan
Businesss Judgment Rule Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, Kompas
Gramedia, Jakarta.

Nadapdap, Binoto, 2013. *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-
Undang No. 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta.

Nadapdap, Binoto. 2021. *Narasi dari Ruang Kerja, Direksi Perseroan
Terbatas (Kajian Parameter Hukum)*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Nasution, Bismar. *Prinsip Good Corporate Governance* pada Perseroan, USU
Press, Medan.

Nariman, Aiman. 2008, *Commercial Applications of Company Law in
Malaysia*, CCH Wolters Kluwer Business, Malaysia.

Nelson, Febby Mutiara 2020, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan
Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nelson, Febby Mutiara. 2020, *Plea Bargaining dan Deffered Prosecution
Agreement* Dalam tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta,

Noor, Hendry Julian. 2018, *Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Badan
Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum*

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nugraha, Satriya. 2016, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal FH Universitas Palangkaraya, Volume 8 Nomor 1, Palangkaraya.

P.A.F. Lamintang. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Pramono, Nindyo. 2001, *Sertifikasi Saham PT. Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Prasetyo. 2013, *Penerapan Business Judgment Rule Dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (PERSERO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pasetio, 2014, *Dilema BUMN “Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Direksi BUMN”*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta

Purwita, Intan Yunasri. 2014. *Unsur Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 686K/Pid.Sus/2007 An. Hi. Amir Piola Isa)*, Universitas Brawijaya, Malang.

Rajaguguk, Erman. 2016, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas, cetakan pertama*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Rajaguguk, Erman. 2011, *Butir-butir hukum ekonomi, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.

dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta.

Renjaan, Henrikus. 2017, *Pentingnya Impelementasi Prinsip Kemandirian*

Direksi Terhadap Proses Penghapusan Piutang Bank BUMN di

Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta.

Ridwan Khairandy, Dkk. 2019, *Menggugat Business Judgment Rule*, Arti

Bumi Intaran, Yogyakarta.

R. Ibrahim, 2007. *Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah*

Tinjauan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26-No. 1-tahun 2007.

Roger LeRoy dan Gaylod A.Jentz , 2012, *Business Law Today, Text And Cases*,

Mason: South Western Cengage Learning.

Schaffmeister, Keijzer, Suturios, Editor: Sahetapy, 1995, *Kumpulan Bahan*

Penataran Hukum Pidana Dalam rangka kerjasama Hukum Indonesia-

Belanda, Liberty, Yogyakarta

Sirait, Ingrum Natasya. 2017, *Hukum Kontrak Bisnis*, USU Press, Medan.

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007, *Penulisan Hukum Normatif*, Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Subhan, M. Hadhi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan*

Praktik di Peradilan), *Cetakan Kedua*, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta.

Sudarto Semarang.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993, *Bab – Bab Tentang Penemuan*

Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sulaiman, Alfin. 2011, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara*

Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

Sumaryanto, A. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*

Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian

Keuangan Negara, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Supramono, Gatot. 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan,

Jakarta.

Syadeni, Sutan Remi, 2011. *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris*, Pustaka

Yustisia, Jakarta.

Tanzi, Vito Tanzi. 1994, *Corruption, Govermental Activities, and markets*,

IMF Working Paper.

Tjandra, W Riawan. 2006, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta.

Tuanaya, Halimah Humayrah. 2012, *Tinjauan Penerapan Ajaran Sifat*

Melawan Hukum Menurut Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tesis, Universitas

Indonesia, Jakarta.

Ubelaker, Michele Healy.1981, *Director Liability under the Business*

Judgment Rule: Fact or Fiction, Jurnal, 35 Sw L.J. 775.

Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*,

PT Alumni, Bandung.

Penerbitan Universitas, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2016. *Pemberantasan Tindak Korupsi (Strategi dan Otimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan. 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan, Cetakan Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaya, Rai. 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cetakan kelima*, Megapoin, Jakarta.

Wojowasito, S. 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.

Zega, Kevin D. 2020. *Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penilaian/Perhitungan Kerugian Negara dalam Teori Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan*, MaPPi FH UI, Depok.

Zega, Kevin D. 2020, *Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi Dengan Administrasi Negara*, Mappi, Depok

Zulmawan, Wawan. 2019, *Business Judgment Rule BUMN*, Permata Aksara, Jakarta.

Zulmawan, Wawan. 2019, *Legal Risk Management BUMN*, Prenamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Peraturan lainnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terpidana

Hotasi D.P Nababan.

Peninjauan Kembali No. 41 PK/Pid.sus/2015 atas nama terpidana Hotasi D.P

Nababan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 979 K/Pid/2004

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret

2020 Atas Nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah Alias Karen

Galaila Agustiawan Alias Karen Agustiawan

Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 34/Pid.Sus-

TPK/2019/PT.DKI 19 September 2019: Atas Nama Terdakwa Ir. Galaila

Karen Kardinah Alias Karen Galaila Agustiawan Alias Karen

Agustiawan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 Atas

Nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah Alias Karen Galaila

Agustiawan Alias Karen Agustiawan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 14 Desember

2021

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.

3/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Tpg

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

2017.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September

2014.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September

2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan
Perseroan Terbatas

Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER- 01/MBU/2011 tanggal 1
Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-
09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Anggaran dasar PT Pertamina (Persero) yang terakhir sesuai dengan Akta No.
27 tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-
AH.01.03-0110415 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, dan/atau
perubahannya.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210303200855-92-613385/erick->

[thohir-pangkas-jumlah-bumn-dari-142-jadi-41](#), diakses pada tanggal 8

September 2021.

Asuransi Jiwasraya, <https://aaji.or.id/Perusahaan/asuransi-jiwasraya>, diakses

pada 24 September 2021.

<https://www.asabri.co.id/page/1/Sejarah>, diakses pada tanggal 21 September

2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan->

[bumn-bukan-bagian-keuangan-negara](#), diakses pada tanggal 22 Maret

2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan->

[bumn-bukan-bagian-keuangan-negara](#), diakses pada tanggal 22 Maret

2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/icw-kerugian-negara->

[akibat-korupsi-cenderung-alami-peningkatan-sejak-2016](#), diakses pada 2

Desember 2021.

CNN Indonesia “*Rangking Indeks Korupsi Merosot urutan 102 dari 180*”,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12->

[599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-](#)

[180](#), diakses pada 5 September 2021

KPK, “Skor IPK Indonesia Menurun”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita->

[kpk/2040-corruption-perception-index-cpi-2020-skor-indonesia-](#)

[menurun#:~:text=Rilis%20CPI%202020%20dari%20TI,ke%2D102%2](#)

[0dari%20180%20negara](#), diakses 8 September 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fb46e7a8edc/cara->

[menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara/](#), diakses 22 Maret 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan->

[mk-ubah-delik-tipikor/](#), diakses 23 Maret 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan->

[bumn-bukan-bagian-keuangan-negara](#), diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

<https://business-law.binus.ac.id/2017/09/16/mengatur-gugatan-derivatif->

[tetapi-tidak-menyelesaikan-gugatan/](#), diakses pada 11 November 2021.

Normand Edwin Elnizar, “Penilaian Besarnya Kerugian Keuangan Negara

Bergantung

Hitungan

Hakim”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61277e69efd30/>

[penilaian-besarnya-kerugian-keuangan-negara-bergantung-hitungan-](#)

[hakim/](#), diakses pada 20 Desember 2021.

Asep N. Mulyana “Business Judgment Rule Versus Tindak Pidana

Korupsi, <https://mediaindonesia.com/opini/189924/business-judgment->

[rule-versus-tindak-pidana-korupsi](#). Diakses pada tanggal 25 Desember

[2021](#).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61b925a64913b/eks-dirut->

[pelindo-ii-rj-lino-divonis-4-tahun-penjara/?page=2](#), diakses pada 28

Desember 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/01/07/14063581/RJ.Lino.Pengadaan->

[QCC.Decision.Paling.Membanggakan.dalam.Hidup.Saya?page=all](#),

[diakses pada 28 Desember 2021](#).